

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi di institusi pemerintah mulai dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum seperti peraturan-peraturan mengenai daerah otonom, pengenalan perangkat teknologi untuk mempercepat proses organisasi, dan penerapan sistem organisasi dengan berbasiskan *good governance* kepada institusi pemerintah. Salah satu pilar utama sistem *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah melalui laporan keuangan yang melaporkan aktivitas pengelolaan keuangan di institusi pemerintah. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia pasca reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Otonomi daerah telah mengubah sistem pengelolaan keuangan negara dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Menurut Wells (2019:13), *fraud* mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca atau pengguna laporan keuangan. Tujuan ini dilakukan dengan motivasi negatif. Pihak-

pihak tertentu akan mengambil keuntungan individu dari kecurangan akuntansi yang dilakukan.

Menurut *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* dapat digolongkan menjadi tiga jenis: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi, pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Manipulasi akuntansi mungkin dilakukan dalam praktik-praktik bisnis oleh perusahaan dan biasanya melibatkan pihak-pihak intern.

Penelitian ini menitikberatkan pada jenis *fraud* korupsi, khususnya dalam pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Kabupaten Rokan Hulu. Fokus penelitian akan mengkaji potensi dan praktik korupsi yang terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah ini. Hal ini mencakup analisis terhadap berbagai bentuk manipulasi akuntansi yang mungkin dilakukan, seperti memanipulasi pencatatan anggaran daerah, menghilangkan dokumen penting terkait pengadaan barang dan jasa, serta melakukan *mark-up* dalam proyek-proyek pembangunan daerah yang dapat merugikan keuangan Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai risiko dan pola korupsi di tingkat OPD Kabupaten Rokan Hulu, yang pada gilirannya dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan dan pengendalian *fraud* yang lebih efektif.

Kecurangan akuntansi telah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian para pelaku bisnis di dunia. Kasus Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) di Indonesia terjadi secara berulang-ulang. Pada sektor publik KKA dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sektor swasta bentuk KKA juga terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana. Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal.

Menurut Baucus 1994 dalam Hernandez dan Groot (2017:14), secara umum perilaku ilegal ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakkan standar moral. Hernandez dan Groot (2017:14) menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh tingkat korupsi suatu Negara. Dilihat dari latar belakang korupsi, pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah menjadi pelaku yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka.

Ditinjau dari teori atribusi, teori ini membahas penyebab-penyebab perilaku seseorang dan upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku seseorang. Sebab perilaku kecurangan terjadi salah satunya karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Seseorang melakukan kecurangan karena adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi. Seseorang mungkin merasa mendapat tekanan untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan atau masalah finansial.

Menurut Kurniawati (2019) kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Longgarnya pengendalian internal dan kurangnya pengasawan dalam suatu perusahaan dapat memicu karyawan untuk melakukan kecurangan. Rasionalisasi merupakan sikap yang membenarkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan fraud. Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya.

Untuk menangani masalah *fraud* diperlukan monitoring, untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan serta restrukturasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain.

Menurut Arens (2018:23), pengendalian internal meliputi lima elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilai risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Elemen-elemen tersebut membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Kegiatan sektor publik merupakan kegiatan yang memiliki perhatian serius dalam masyarakat. Mulai dari perencanaan tujuan sampai dengan hasil yang diinginkan merupakan kerangka pemikiran mutlak yang diinginkan oleh setiap pemerintahan. Untuk dapat mewujudkan hal ini, pemerintah dapat melakukan pengendalian dalam setiap proses pelaksanaannya. Boynton et al. (2018:14) mendefinisikan aktivitas pengendalian sebagai kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilakukan. Organisasi dengan tingkat kontrol yang tinggi akan menurunkan tingkat terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah. Tindakan ini untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi pemerintah yang optimal. Tentu saja optimalitas itu terjadi jika organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan, menjalankan pengamanan aset negara, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Variabel kedua dalam penelitian ini kompensasi. Hubungan antara kompensasi dan risiko *fraud* di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat kompleks. Kompensasi yang adil dan memadai dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai, memotivasi pegawai untuk berkinerja tinggi, dan menciptakan

lingkungan kerja positif. Namun, ketidakpuasan terhadap kompensasi dapat mengarah pada penurunan kepuasan kerja dan meningkatkan risiko terjadinya perilaku tidak etis, termasuk *fraud*. Pegawai yang merasa tidak dihargai atau merasa ketidakpuasan dengan tingkat kompensasi merasa tergoda untuk mencari bentuk kompensasi tambahan secara tidak sah, seperti melalui manipulasi keuangan atau penyalahgunaan sumber daya organisasi. Oleh karena itu, manajemen OPD perlu memastikan kebijakan kompensasi yang adil dan sesuai, guna mendukung kepuasan kerja yang tinggi dan mencegah potensi risiko *fraud* yang dapat merugikan integritas organisasi. Dengan demikian, pengelolaan kompensasi yang cermat dapat menjadi salah satu kunci dalam memitigasi risiko *fraud* di lingkungan OPD.

Faktor lain yang mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah ketaatan aturan akuntansi. PP RI No. 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa standar akuntansi keuangan adalah aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur akuntansi, penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dan prosedur pengelolaan aset organisasi, dengan aturan yang telah ditentukan dalam SAP. Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi karena apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang memicu terjadinya kecurangan akuntansi.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *fraud* adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merujuk pada penggunaan berbagai alat, sistem, dan aplikasi digital untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara efektif dan efisien. Tujuan utama pemanfaatan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat proses kerja, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan komunikasi, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas merujuk pada penggunaan berbagai alat dan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Hal ini mencakup penggunaan komputer, jaringan internet, sistem manajemen database, aplikasi *e-government*, dan *platform* komunikasi digital untuk mengoptimalkan proses administrasi, pengambilan keputusan, dan pelayanan masyarakat. Dinas-dinas pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, memudahkan akses informasi bagi masyarakat, serta mengintegrasikan data antar instansi. Misalnya, penggunaan sistem informasi terpadu untuk pengelolaan keuangan daerah, aplikasi pelayanan perizinan *online*, atau portal informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan dan informasi pemerintah dengan lebih mudah dan cepat.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, Kinerja Pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat khususnya dalam mengelola dana publik. Pada tahun 2016 terjadi kasus dugaan penyelewengan anggaran Satpol PP Rokan Hulu tahun 2016 yang merugikan negara sebesar Rp150 miliar oleh Kasatpol PP Rokan Hulu.

Selanjutnya Pada tahun 2017 Kadis Dinas Perhubungan Rohul dan bendahara Dinas Perhubungan Rohul ditahan karena diduga telah melakukan penyelewengan dana tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) sekitar Rp 639 juta. Dimana dana PJU tersebut telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2017, tapi tidak disektor ke PLN (www.riaumandiri.id tahun 2018). Di tahun yang sama, yaitu 2017, bupati terpilih secara demokratis juga ditangkap karena melakukan dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun 2014 (www.riauonline.co.id tahun 2019).

Di tahun 2018, terjadi mosi tidak percaya dari mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di Hadapan Mapolda Riau terkait dugaan permasalahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berupa: terkait pengadaan instalasi air limbah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Dinas Kesehatan Kabupaten Rohul dengan pagu Anggaran 2.020.000.000, terkait bansos penyelesaian tugas akhir mahasiswa Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 sebesar Rp 530 juta diduga terjadi penyelewengan anggaran yang merugikan dunia pendidikan Kabupaten Rohul, khususnya mahasiswa sehingga mendesak Bupati Rohul untuk mencopot jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah kabupaten Rokan Hulu yang diduga tidak becus dalam mengelola dana bansos yang berakibat merugikan mahasiswa Rohul. Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan sapi di Kabupaten Rokan Hulu dengan pagu anggaran mencapai Rp 4,5 milyar rupiah tahun 2013 dan Rp. 6.090.500.00,00 tahun 2014 (www.detikperistiwa.com tahun 2018).

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas jauh lebih lanjut dengan judul yang diajukan oleh peneliti adalah :“ Pengaruh Kefektifan Pengendalian Internal, Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap *Fraud* (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu?
5. Apakah keefektifan pengendalian internal, kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu.
5. Untuk mengetahui apakah keefektifan pengendalian internal, kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta pemahaman mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal, kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi terhadap pencegahan *fraud*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pengaruh keefektifan pengendalian internal, kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi terhadap pencegahan *fraud*, sehingga hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan bagi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Rokan Hulu agar dapat melakukan pencegahan *fraud*.

3. Manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya..

1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini pada masalah bagaimana pengaruh keefektifan pengendalian internal, kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebanyak 19 OPD Dinas diantaranya: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu Pintu, Dinas

Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.5.2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Maksyur dan Naksir (2018), dengan judul ” Pengaruh keefektifan pengendalian internal, perilaku tidak etis dan ketaatan aturan akuntansi terhadap *fraud* melalui kepuasan kerja (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)”.

Perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah terletak pada variabel serta objek dan lokasi penelitian yang digunakan. Pada penelitian Maksyur dan Naksir (2018) menggunakan variabel bebas yang terdiri dari keefektifan pengendalian internal, perilaku tidak etis dan ketaatan aturan akuntansi dan menggunakan variabel mediasi yaitu kepuasan kerja sedangkan peneliti mengganti variabel bebas perilaku tidak etis dengan kompensasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta tidak menggunakan variabel mediasi

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi kajian pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis. Pada kajian pustaka di bahas teori-teori atau konsep yang mendukung topik penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Keefektifan Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern adalah rangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan pengawasan dan pengarahan kepada pihak-pihak yang berada di dalam organisasi, agar nantinya bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik (Anandya dan Werastuti, 2020). Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas laporan keuangan dalam suatu organisasi. Menurut Atmadja dan Komang (2017) sistem pengendalian intern yang baik bisa mengantisipasi timbulnya fraud pada pengelolaan dana desa, terlebih jika dana desa diawasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta lembaga keuangan independen. Bertambah kuat sistem pengendalian intern yang ada di pemerintahan desa maka dapat menurunkan tingkat kecurangan yang akan dilakukan, sebaliknya jika sistem pengendaliannya lemah akan menjadi kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Menurut Sujarweni dalam Prastyaningtyas (2019) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan. Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut SA 315 (IAPI, 315: 2) adalah: "Proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata Kelola, manajemen, dan personel lain untuk

menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan kendalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan”.

Hery dalam Prastyaningtyas (2019) menjelaskan bahwa :“Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hokum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah sistem yang dirancang oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk melindungi asset perusahaan dari segala bentuk pelanggaran.

2.1.1 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Terdapat lima unsur komponen sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah dasar terhadap semua komponen pengendalian internal atau sebagai pondasi dari komponen-komponen lainnya. Memiliki lingkungan yang baik dan kondusif adalah suatu kewajiban dalam suatu organisasi pemerintah. Kondisi lingkungan kerja yang baik dan kondusif akan mendukung keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah sebuah hasil dari daftar risiko, status risiko, dan peta risiko yang menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedurnya pada kegiatan pengendalian. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah teridentifikasi pada pencapaian tujuan suatu instansi pemerintah.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian pada umumnya terdiri dari pengendalian sistem informasi, pembinaan sumber daya manusia, dan review hasil kinerja pegawai selama berkala.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi wajib diselenggarakan secara efektif oleh suatu lembaga atau organisasi. Organisasi dapat memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi.

5. Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi secara terpisah, melakukan pemantauan secara rutin, dan menindaklanjuti dari hasil audit yang dilakukan.

Menurut Boyton dan Johnson (2019:13) mengidentifikasi lima unsur yang saling terkait dalam pengendalian internal:

1. *Control environment*

Adalah menetapkan tujuan dari sebuah organisasi, yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen lain dari pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2 *Risk assessment* (penaksiran resiko)

Adalah identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuannya entitas, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3 *Control activities* (aktivitas pengendalian)

Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa manajemen yang diarahkan telah dilakukan.

4 *Information and communication* (informasi dan komunikasi)

Adalah identifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

5 *Monitoring* (pemantauan)

Adalah proses yang menilai kualitas internal kinerja kontrol

Pendapat ini sejalan dengan Ikantana Akuntan Indonesia (2009:23) yang mengemukakan ada lima unsur (komponen) pengendalian yang saling terkait berikut ini:

1. Lingkungan pengendalian

Menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.

2. Penilaian resiko

Penilaian resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

5. Pemantauan pengendalian internal

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Pada penelitian ini menggunakan indikator sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

2.2 Kompensasi

Berdasarkan Panggabean (2019:56), kompensasi seringkali juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Mondy (2019:78) menjelaskan kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah

mereka berikan. Dalam pandangan Sihotang (2020:28) kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi pegawai dan para manajer baik berupa finansial maupun barang dan jasa pelayanan yang diterima oleh setiap orang karyawan.

Hariandja (2019: 244) menyatakan bahwa kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, hari raya, uang makan dll. Sebagaimana diungkapkan Tohardi (2019:26) mengemukakan bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan, perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan (*worth*) dan keadilan (*equity*). Karena bila kompensasi dirasakan tidak layak dan tidak adil oleh para karyawan, maka tidak mustahil hal tersebut merupakan sumber kecemburuan sosial. Pendapat Simamora (2019:514), kompensasi adalah insentif berbentuk bayaran yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas para karyawan agar produktivitas nya tinggi. Sesuai pernyataan Nawawi (2020:319), kompensasi adalah suatu usaha untuk menumbuhkan perasaan diterima dilingkungan kerja, yang didalamnya menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja yang satu dengan yang lainnya.

Seperti disampaikan Luthans (2019:153), kompensasi adalah penghargaan dan benefit meliputi, uang (gaji, bonus, gaji insentif). Dalam perspektif Handoko (2019:66), kompensasi merupakan sebagai bentuk apresiasi usaha untuk

mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai tuntutan jabatan diperlukan suatu pembinaan yang berkeseluruhan, yaitu suatu usaha kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan tenaga kerja agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Sebagai langkah nyata dalam hasil pembinaan maka diadakan pemberian kompensasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai kompensasi maka dapat penulis simpulkan bahwa kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif dan tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti dan lain-lain

2.2.1 Tujuan Kompensasi

Notoadmodjo (2019:21), menyebutkan ada beberapa tujuan dari kompensasi yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Menghargai prestasi kerja.

Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan.

2. Menjamin keadilan.

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi.

3. Mempertahankan karyawan.

Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih *survival* bekerja pada organisasi itu.

4. Memperoleh karyawan yang bermutu.

Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan akan lebih banyak pula peluang untuk memilih karyawan yang terbaik.

5. Pengendalian biaya.

Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen, sebagai akibat semakin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain.

6. Memenuhi peraturan-peraturan.

Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah..

2.2.2 Indikator Kompensasi

Indikator-indikator kompensasi menurut Simamora (2019:445) diantaranya :

1. Upah dan gaji

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji. Upah merupakan basis bayaran yang seringkali digunakan bagi karyawan produksi dan pemeliharaan.

2. Insentif

Insentif adalah tambahan Kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi.

3. Tunjangan

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung instansi, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian.

4. Fasilitas

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil instansi, keanggotaan klub, tempat parkir khusus,. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari Kompensasi, terutama bagi eksekutif yang dibayar mahal.

Menurut Notoadmodjo (2019:21), indikator kompensasi terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kompensasi bersifat normatif Kompensasi bersifat normatif adalah kompensasi minimum yang harus diterima, yang terdiri dari gaji atau upah dan tunjangan tetap seperti tunjangan kesehatan dan hari raya atau keagamaan.
2. Kompensasi bersifat kebijakan Kompensasi bersifat kebijakan adalah kompensasi yang didasari kebijakan dan pertimbangan khusus, seperti tunjangan profesional, tunjangan makan, tunjangan transpor, bonus, uang cuti, jasa produksi, dan liburan.

Indikator kompensasi yang di kemukakan oleh Handoko (2019:66) adalah:

1. Gaji Imbalan yang di berikan oleh pemberi kerja kepada pegawai, yang penerimaannya bersifat rutin dan tetap setiap bulan walaupun tidak masuk kerja maka gaji akan tetap diterima secara penuh.
2. Insentif Penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.
3. Bonus Pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja.
4. Upah Pembayaran yang diberikan kepada pegawai dengan lamanya jam kerja.

5. Premi Premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal.

Pada penelitian ini menggunakan indikator kompensasi menurut Simamora (2019:445) yaitu:

1. Upah dan gaji
2. Insentif
3. Tunjangan
4. Fasilitas

2.3 Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan adalah patuh atau menaati aturan yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aturan adalah suatu cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya dituruti atau dilakukan. Dalam suatu instansi, tentu saja terdapat aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan akuntansi suatu instansi yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan akuntansinya (Rizky, 2019).

Aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Dalam aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran serta penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan

informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi (Lilik, 2019).

2.3.1 Indikator Ketaatan Aturan Akuntansi

Aturan akuntansi dibuat sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dalam standar akuntansi terdapat aturanaturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian. Devy et al., (2016), variabel ini terdiri atas 5 indikator diantaranya:

1. Persyaratan Pengungkapan.
2. Menyajikan Informasi Yang Bermanfaat Bagi Kepentingan Publik.
3. Objektif.
4. Memenuhi Syarat Kehati-hatian.
5. Memenuhi Konsep Konsistensi Penyajian

Menurut Thoyibatun dalam Wahyuni (2016) indikator-indikator ketaatan aturan akuntansi sebagai berikut:

1. Tanggungjawab penerapan

Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain,

bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

3. Obyektifitas

Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

4. Kehati-hatian

Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

5. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapnya.

6. Konsistensi

Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak di ubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

7. Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Menurut Rizky (2019) indikator-indikator ketaatan aturan akuntansi sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

2. Obyektifitas

Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

3. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban professional atau hokum untuk mengungkapnya.

4. Konsistensi

Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak di ubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pada penelitian ini menggunakan indikator ketaatan aturan akuntansi menurut Devy et al., (2016), yaitu:

1. Persyaratan pengungkapan.
2. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik.
3. Objektif.
4. Memenuhi syarat kehati-hatian.
5. Memenuhi konsep konsistensi penyajian

2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah (Teknologi Informasi). Pada awalnya teknologi informasi dikembangkan manusia pada masa pra sejarah dan berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal, mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua, tentang berburu dan binatang buruannya. Sampai saat ini teknologi informasi terus terus berkembang tetapi penyampaian dan bentuknya sudah lebih modern.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Lantip dan Rianto (2017:4) teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembanganya sangat pesat. Menurut Bambang Warsita (2018:135) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Hamzah dan Nina (2018:57) juga mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data.

Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Menurut McKeown (2018:10) teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teori yang lain juga diungkapkan oleh Setiawan (2018:2) teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Teori pendukung yang lain menurut Behan dan Holme (2019:31) teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang mendukung untuk *me-record*, menyimpan, memproses, mendapat lagi, memancar/mengantarkan dan menerima informasi.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (*hardware, software, useware*) yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas.

2.4.1 Fungsi Teknologi Informasi

Fungsi teknologi informasi menurut Sutarman (2019:18) adalah sebagai berikut :

1. Menangkap (*Capture*)

Yaitu merupakan suatu proses penangkapan data yang akan menjadi data masukan.

2. Mengolah (*Processing*)

- a. Mengkomplikasikan catatan rinci dan aktivitas, misalnya menerima input dari *keyboard*, *scanner*, *mic* dan sebagainya.
- b. Mengolah/memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan/pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala data dan informasi.
- c. *Data processing*, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi
Information processing, suatu aktivitas komputer yang memproses dan mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe/bentuk yang lain dari informasi.
- d. *Multimedia system*, suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai tipe/bentuk dari informasi secara bersamaan (*simultan*).

3. Menghasilkan (*Generating*)

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya.

4. Menyimpan (*Storage*)

Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

5. Mencari kembali (*Retrival*)

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) data dan informasi yang sudah tersimpan.

6. Transmisi (*Transmission*)

Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer.

2.4.2 Manfaat Teknologi Informasi

Keuntungan dari penerapan teknologi informasi menurut Sutarman (2019: 19) adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan (*Speed*)

Komputer dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia.

2. Konsistensi (*Consistency*)

Hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah karena formatnya (bentuknya) sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan yang persis sama.

3. Ketepatan (*Precision*)

Komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat (presisi). Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.

4. Keandalan (*Reliability*)

Apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi lebih kecil kemungkinannya jika menggunakan computer.

2.4.3 Indikator Teknologi Informasi

Adapun keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui indikator teknologi informasi menurut Setiawan (2018:2) yaitu:

1. Kemanfaatan meliputi:
 - a. Menjadi pekerjaan lebih mudah (*makes job easier*)
 - b. Menjadi pekerjaan lebih menyenangkan
 - c. Menjadi pekerjaan lebih menarik.
2. Konsekuensi jangka panjang meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas kerja
 - b. Meningkatkan fleksibilitas pekerjaan

Menurut Darmawan (2018:17), indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi yaitu:

1. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan keefektifan kerja
2. Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu dalam pekerjaan-pekerjaan rutin.
3. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kuantitas hasil pekerjaan dengan tingkat usaha yang sama.
4. Penggunaan teknologi informasi dapat menjadikan karyawan sebagai orang yang kompeten.

Teknologi informasi memiliki beberapa indikator utama yang mendukungnya. Indikator yang mendukung teknologi informasi menurut Sutarman (2019: 19) diantaranya adalah:

1. Komputer (sistem komputer)

Komputer meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan alat penyimpanan (*storage*). Sistem komputer terdiri dari komputer, *software*, informasi, pemrograman, manusia, dan komunikasi.

2. Komunikasi

Beberapa fasilitas komunikasi yang sering digunakan diantaranya adalah *modem, multiplexer, concentrator, pemroses depan, bridge, gateway, dan network card*.

3. Keterampilan Penggunaan

Semua kemajuan dan perkembangan teknologi yang ada akan sia-sia apabila sumber daya manusia yang ada tidak mampu menguasainya.

Pada penelitian ini menggunakan indikator kompensasi menurut Setiawan (2018:2) yaitu:

1. Kemanfaatan
2. Konsekuensi jangka panjang

2.5 ***Fraud***

Kecurangan akuntansi (*fraud*) sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja menggunakan aset internal secara tidak wajar dan keliru dalam memberikan realitas pada keuntungan pribadi. Menurut *The Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam buku Abdul (2018) yang berjudul *Auditing* (Jilid 1) kecurangan adalah segala sesuatu yang secara luhur dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan menyembunyikan kebenaran. Bentuk kecurangan laporan keuangan menurut IAI (2001) yaitu: Manipulasi,

Penyajian yang salah, Salah penerapan prinsip secara sengaja, Ketidaktepatan aset. Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal.

Kecenderungan didefinisikan sebagai “kecondongan, kesudian, keinginan” (Ali, 2017:61) yang menyimpulkan bahwa adanya keinginan untuk melakukan kecurangan karena adanya peluang (kesempatan) untuk melakukan kecurangan. Kecurangan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Tuannakotta, 2017:96).

Kecenderungan menurut Daryanto dalam Thoyibatun (2019) diartikan sebagai “lebih tertarik pada”. Kecurangan sering kali menyangkut (a) suatu tekanan atau suatu dorongan untuk melakukan kecurangan, (b) suatu peluang yang disarankan ada untuk melaksanakan kecurangan (Wilopo, 2016). IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) (2016) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan,
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Bastian (2017) kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) terdiri dari tindakan-tindakan seperti:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.
2. Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan.
3. Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi adalah lebih tertarik ingin melakukan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan karena adanya penghilangan secara jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.5.1 Tipe-tipe *Fraud*

Menurut Amin Widjaja (2018) terdapat dua tipe kecurangan akuntansi yaitu:

1. Kecurangan eksternal Kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah.

2. Kecurangan internal Tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manager dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kecurangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan itu sendiri.

2.5.2 Indikator *Fraud*

The ACFE dalam Nurun Nadia, Nyata Nugrahadan Sartono (2023) membagi indikator kecurangan (*fraud*) dalam tiga tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Kecurangan pelaporan keuangan terdiri dari :
 - a. *Timing difference (improper treatment of sales)*, mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi yang sebenarnya.
 - b. *Fictitious revenues*, menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif).
 - c. *Canceled liabilities and expenses*, menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus.
 - d. *Improper disclosures*, perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi.
 - e. *Improper asset valuation*, penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

2. Penyalahgunaan aset, terdiri dari:

- a. Kecurangan kas (*cash fraud*), meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang, seperti pemalsuan cek.
- b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other assets*), berupa pencurian dan pemakaian persediaan/aset lainnya untuk kepentingan pribadi.

3. Korupsi (*Corruption*). Yaitu menyangkut kerja sama dengan pihak lain dalam menikmati keuntungan seperti suap dan korupsi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kecurangan akuntansi diambil dari SPAP (2011) Seksi 316, yaitu:

1. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
2. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi atau informasi signifikan.
3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
4. Penyajian laporan keuangan yang salah akibat penggelapan terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak diterima
5. Penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Pada penelitian ini menggunakan indikator kompensasi menurut *The ACFE* dalam Nurun Nadia, Nyata Nugrahadan Sartono (2023) yaitu:

- 1 Kecurangan pelaporan keuangan
2. Penyalahgunaan aset
3. Korupsi

2.6 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

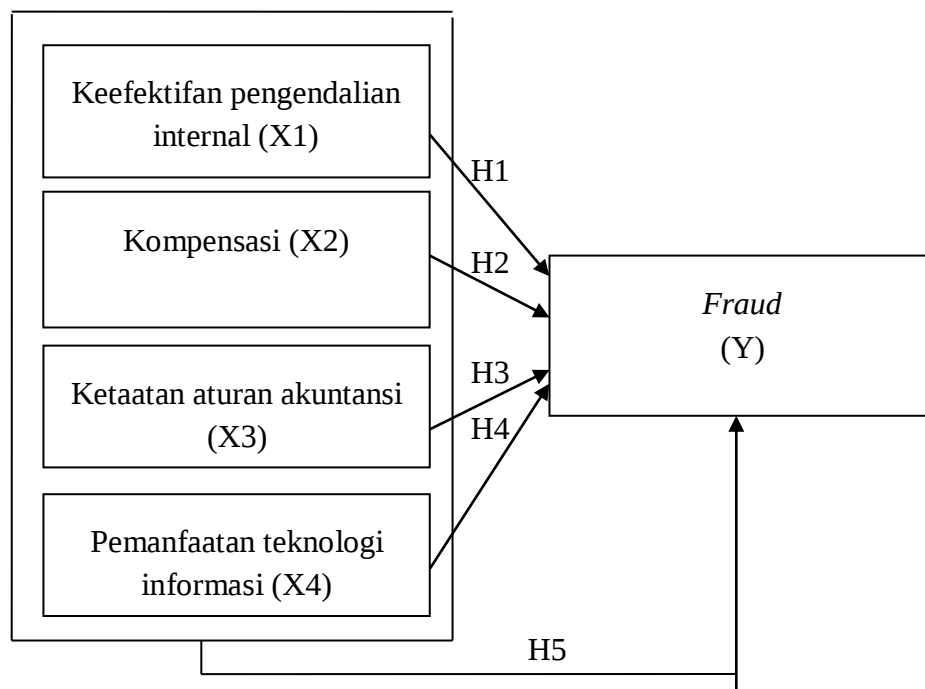
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
Ni Komang Norma Nita (2019)	Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Asimetri Informasi dan Kapabilitas pada kecurangan akuntansi	Variabel bebas : Pengendalian internal, Integritas, Asimetri informasi, Kapabilitas Variabel terikat kecurangan akuntansi (Y)	Regrsi linier berganda	pengendalian internal berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi.
Maksyur dan Naksir (2018)	Pengaruh keefektifan pengendalian internal, perilaku tidak etis dan ketaatan aturan akuntansi terhadap <i>fraud</i> melalui kepuasan kerja	Variabel bebas terdiri dari : keefektifan pengendalian internal, perilaku tidak etis dan ketaatan aturan akuntansi Variabel terikat <i>fraud</i> Variabel mediasi kepuasan kerj	SEM PLS	Keefektifan pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> .
Ni Komang Linda Lestari (2017)	Pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetriinformasi pada kecurangan	Variabel bebas: Pengendalian internal, integritas, asimetri informasi Variabel terikat kecurangan	Regrsi linier berganda	Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi di OPD Kabupaten

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
	akuntansi	akuntansi		Klungkung,
Eka Prasetya Agrarini (2015)	Pengaruh kompensasi terhadap <i>fraud</i> dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening	Variabel bebas: kompensasi Variabel terikat <i>fraud</i> Variabel intervening kepuasan kerja	Regresi linier sederhana dan <i>Boots trapping</i>	Kompensasi berpengaruh negatif terhadap <i>Fraud</i>
Ichsan Randiza (2016)	Pengaruh pengendalian internal, asimetri informasi, moralitas aparat pemerintah dan ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi kasus pada skpd kab. Indragiri hilir)	Variabel bebas : Pengendalian internal, Asimetri informasi, moralitas aparat, ketaatan aturan Variabel terikat adalah kecenderungan kecurangan akuntansi	Regrsi linier berganda	pengendalian internal daan ketaatan aturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Di SKPD Tembilahan.
Fernanda Fernan dhytia dan Muslichah (2022)	The Effect Of Internal Control, Individual Morality And Ethical Value On Accounting Fraud Tendency	Variabel independen: pengendalian internal, moralitas individu, nilai etis variabel dependen: kecenderungan kecurangan akuntansi	Regrsi linier berganda	pengendalian internal mempunyai dampak negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
Risma Choirunn Isa dan Yanti Rufaedah (2022)	Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pendeteksian Fraud	Variabel independen: kompetensi auditor dan pemanfaatan teknologi informasi variabel dependen : pendeteksian fraud	Regrsi linier berganda	Kompetensi auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
				pendeteksian kecurangan.
Muhammad Rafli Djatmiko (2020)	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Variabel Moderating Terhadap Fraud	Variabel bebas: Kesesuaian Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Variabel terikat fraud Variabel mediasi Budaya Etis Organisasi	SEM PLS	Kesesuaian kompensasi, tidak berpengaruh terhadap kecurangan (<i>fraud</i>). Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (<i>fraud</i>)

2.7 Kerangka Pemikiran

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

3.8. P erumusan Hipotesis

3.8.1 Pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap *fraud*

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan agar keandalan pelaporan keuangan entitas, efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan entitas serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan tetap terjaga. Pada penelitian Fauziyah, N. A. (2019).

Penelitian ini saling berhubungan bahwa sebagaimana pengendalian internal berpengaruh untuk suatu instansi yang dapat diterapkan dalam sehari-hari yang dapat memicu suatu *Fraud*. Sama halnya dengan penelitian Rahmaidha (2016), bahwa penelitian ini juga saling berhubungan, sebagaimana sistem pengendalian internal dapat diterapkan pada suatu perusahaan sebagai pengendalian atas terjadinya suatu kecurangan. Keefektifan pengendalian internal ini bertujuan untuk sebagai pengendalian sehingga dengan adanya pengendalian kecurangan tidak akan terjadi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan.

H₁ : Keefektifan pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu.

3.8.2 Pengaruh kompensasi terhadap *fraud*

Kompensasi, yang mencakup gaji, tunjangan, dan insentif lainnya, dapat memiliki dampak signifikan terhadap perilaku pegawai, termasuk kecenderungan untuk melakukan *fraud* atau kecurangan. Teori yang ada menunjukkan bahwa

kompensasi yang memadai dan adil dapat mengurangi motivasi pegawai untuk melakukan tindakan fraud, karena kebutuhan finansial mereka terpenuhi dan merasa dihargai oleh organisasi. Sebaliknya, kompensasi yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab dapat meningkatkan risiko fraud, karena pegawai mungkin merasa perlu mencari sumber pendapatan tambahan melalui cara-cara yang tidak etis. Penelitian Eka Prasetya Agrarini (2015) menunjukkan hasil bahwa kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

H₂ : Kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu.

3.8.3 Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *fraud*

Di dalam suatu instansi terdapat dasar atau pedoman yang digunakan manajemen dalam menentukan dan melaksanakan jalannya berbagai kegiatan di dalam perusahaan salah satunya adalah aturan mengenai kegiatan akuntansi. Pada penelitian Irwansyah (2018) penelitian ini saling berhubungan bahwa, aturan akuntansi harus ditaati sebagaimana jika aturan tersebut ditaati maka kecurangan kemungkinan tidak akan terjadi. Sama halnya pada penelitian Rahmaidha (2016), bahwa penelitian ini saling berhubungan, sebagaimana semakin taat suatu instansi akan aturan akuntansi, maka kecurangan akuntansi akan berkurang. Ketaatan aturan akuntansi ini bertujuan untuk sebagai pedoman sehingga dengan adanya pedoman tersebut kecurangan akan berkurang. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Ketaatan aturan akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu.

3.8.4 Pengaruh teknologi informasi terhadap *fraud*

Pemanfaatan teknologi informasi merujuk pada penggunaan berbagai alat, sistem, dan aplikasi digital untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara efektif dan efisien. Tujuan utama pemanfaatan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat proses kerja, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan komunikasi, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas merujuk pada penggunaan berbagai alat dan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Dinas-dinas pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, memudahkan akses informasi bagi masyarakat, serta mengintegrasikan data antar instansi.

H₄ : Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu.

3.8.5 Pengaruh keefektifan pengendalian internal, kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan teknologi informasi terhadap *fraud*

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi antara lain adalah keefektifan sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kompensasi

dan pemanfaatan teknologi informasi. Jika dalam suatu instansi seorang pegawai memiliki pengendalian internal yang berjalan dengan efektif serta ditaatinya aturan akuntansi, maka kecurangan akuntansi tidak akan terjadi. Dengan demikian, terjadi keseimbangan antara keefektifan pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ : Keefektifan pengendalian internal, kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:144) Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang suatu hal (variabel tertentu). Penelitian ini memiliki obyek penelitian yang terdiri dari empat variabel yaitu keefektifan pengendalian internal, kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi (variabel independen) yang mempengaruhi variabel terikat (dependen). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fraud*. Adapun subjek penelitian yang diambil adalah OPD Dinas Kabupaten Rokan Hulu.

3.2. Jenis Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Rancangan penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan menggunakan suatu instrumen penelitian dalam pengumpulan data, serta analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanasi. Penelitian eksplanasi adalah penelitian yang memiliki tujuan dalam memaparkan suatu pengaruh yang terjadi antar variabel. Di dalam penelitian eksplanasi akan digunakan sampel dalam pengambilan data serta hipotesis yang perlu diuji

kebenarannya. Jenis penelitian eksplanasi digunakan karena sesuai dengan penelitian ini yang bermaksud melakukan pengujian variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.3. Populasi dan sampel

Menurut Sugiyono (2019) pengertian dari populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan arakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Berdasarkan pendapat tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada OPD Dinas Kabupaten Rokan Hulu.

Sampel penelitian adalah “bagian yang mewakili populasi untuk diteliti” (Sugiyono, 2019). Sampel yang diambil dari pegawai yang bekerja pada OPD Dinas Kabupaten Rokan Hulu menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Pertimbangan yang digunakan dalam penentuan sampel adalah: pegawai yang memiliki pengaruh dalam melakukan kecurangan akuntansi yaitu pemegang jabatan pengelola keuangan diantaranya: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran. Jumlah OPD Dinas Kabupaten Rokan Hulu yang termasuk dalam penelitian yaitu berjumlah 19 OPD Dinas (dengan asumsi jumlah responden per OPD Dinas berjumlah 4 responden, maka total sampel dalam penelitian ini adalah dengan total 76 responden).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini termasuk dalam data kuantitatif adalah data yang dipakai berupa angka-angka. Adapun dilihat berdasarkan sumbernya maka termasuk dalam sumber data primer karena datanya diperoleh langsung dari sumbernya. Responden akan menjadi sumber langsung dari penelitian ini. Sementara sumber data dalam penelitian berasal dari pegawai yang bekerja di OPD Dinas Kabupaten Rokan Hulu pada bagian pemegang jabatan pengelola keuangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer, yaitu data yang berasal langsung dari sumber asli atau pertama melalui *instrument* yang disebut kuesioner yang diantarkan, dititipkan atau dikirimkan kepada pegawai di OPD Dinas Kabupaten Rokan Hulu pada bagian pemegang jabatan pengelola keuangan diantaranya: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara, yaitu mendatangi langsung pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Rokan Hulu dengan sebelumnya menelpon terlebih dahulu untuk persetujuan mengisi kuesioner dan menghubungi kerabat-kerabat yang dikenal secara pribadi bekerja di OPD Kabupaten Rokan Hulu yang dituju, untuk dibagikan kepada rekan-rekannya.

3.6 Variabel Penelitian

Tabel 3.1
Identifikasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator
1.	Keefektifan Pengendalian internal (X1) menurut Prastyaningtyas (2019) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan.	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2.	Kompensasi (X2) Menurut Simamora (2019:514), kompensasi adalah insentif berbentuk bayaran yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas para karyawan agar produktivitas nya tinggi.	1. Upah dan gaji 2. .Insentif 3. Tunjangan 4. Fasilitas Simamora (2019:445)
3.	Ketaatan aturan akuntansi (X3) Menurut Rizky (2019) adalah kegiatan akuntansi suatu instansi yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan akuntansinya	1. Persyaratan Pengungkapan. 2. Menyajikan Informasi Yang Bermanfaat Bagi Kepentingan Publik. 3. Objektif. 4. Memenuhi Syarat Kehati-Hatian. 5. Memenuhi Konsep Konsistensi Penyajian Devy et al., (2016)
4.	Pemanfaatan teknologi informasi (Y) Menurut Setiawan (2018:2) merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi.	1. Kemanfaatan 2. Konsekuensi jangka panjang Setiawan (2018:2)

No	Variabel	Indikator
5.	<i>Fraud</i> (Y) Menurut Abdul (2018) yang berjudul Auditing (Jilid 1) kecurangan adalah segala sesuatu yang secara lhai dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan menyembunyikan kebenaran.	1 Kecurangan pelaporan keuangan 2. Penyalahgunaan aset 3. Korupsi <i>The ACFE</i> dalam Nurun Nadia, Nyata Nugrahadan Sartono (2023)

3.7 Instrumen Penelitian

Setiap variabel akan diukur dengan menggunakan indikator variabel. Indikator dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2019:34). Selanjutnya jawaban responden akan diberi skor atau nilai dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari:

- a. SS (Sangat Setuju) = Skor 5
- b. S(Setuju) = Skor 4
- c. RG (Ragu-Ragu) = Skor 3
- d. TS (Tidak Setuju) = Skor 2
- e. STS (Sangat Tidak setuju) = 1

3.8 Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Metode statistik diskriptif ini merupakan cara yang memudahkan dalam penyajian data sehingga mudah

dipahami. Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk meneliti nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum) dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

2. Uji Asumsi klasik

Model regresi yang tidak terjadi bias apabila sesuai dengan syarat BLUE (Best Liner Unbiased Estimator), karena itu diperlukan uji asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan beberapa uji asumsi klasik yang digunakan sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

a. Uji normalitas

Pengujian terhadap normalitas digunakan untuk menguji data independent variable (X) dan data dependent variable (Y) pada sebuah persamaan regresi yang dihasilkan. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data independent variable dan dependent variable berdistribusi normal. *Kolmogorov Smirnov Test* dan *P-P plot chart* dapat digunakan untuk uji normalitas. *Kolmogorov Smirnov Test* kriterianya adalah kriteria: 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2 – tailed)* $\geq 0,05$ data berdistribusi normal; dan 2) Jika nilai *Asymp. Sig. (2 – tailed)* $\leq 0,05$ data tidak berdistribusi normal. Sedangkan dikatakan terdistribusi normal untuk *P-P plot chart* ketika data berdekatan dengan garis diagonal pada *P-P plot chart*

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas diperuntukkan bagi suatu analisis regresi linier berganda yang menggunakan dua independent variable atau lebih ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) karena dalam pengujian multikolinieritas akan diukur tingkat keeratan (asosiasi) pengaruh antar independent variable

tersebut. Uji multikolinieritas dilihat berdasarkan tolerance value dan VIF yang terdapat pada tabel Coefficients hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Suatu variabel dikatakan terjadi multikolinieritas apabila nilai tolerance < 0,1 atau VIF > 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui terdapatnya perbedaan varians residual yang terjadi pada suatu periode observasi ke periode observasi yang lain atau penjabaran korelasi antara valuee predicted dengan studentized delete residual nilai tersebut. Apabila varians residual sama, disebut sebagai homoskedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas) dan ini yang mutlak harus terjadi. Sedangkan jika varians residual memiliki perbedaan maka secara mutlak disebut sebagai heteroskedastisitas. Dalam mengetahui suatu model regresi apakah mengandung homoskedastisitas atau heteroskedastisitas dapat dilakukan berdasarkan grafik scatterplot. Ketentuannya adalah apabila pada grafik scatterplot tidak memiliki model yang jelas dengan penyebaran titik berada di atas serta di bawah 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah suatu persamaan regresi yang digunakan dalam menjelaskan terjadinya pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y = *Fraud*

a = Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila $X = 0$

b = Koefisien regresi dari variabel bebas

X_1 = Keefektifan Pengendalian internal

X_2 = Kompensasi

X_3 = Ketaatan aturan akuntansi

X_4 = Pemanfaatan teknologi informasi

e = Eror

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan dalam mengukur persentase kontribusi yang diberikan oleh independent variable yang diteliti terhadap perubahan yang terjadi pada dependent variable. Besarnya nilai yang diperoleh dari R^2 berada dalam kisaran nol hingga satu, artinya jika $R^2 = 0$ maka memiliki arti independent variable tidak memiliki kontribusi terhadap dependent variable. Sebaliknya nilai R^2 yang semakin dekat dengan angka 1 maka independent variable memiliki kontribusi yang besar terhadap perubahan yang terjadi pada dependent variable. Nilai koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada kolom R Square pada tabel model summary hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS.

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji-t (Uji parsial)

Uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas yang diteliti dengan variabel terikat secara individual (parsial). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Apabila nilai t hitung $>$ t tabel, variabel independen memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat diketahui variabel independen mana yang mempunyai pengaruh yang paling bermakna atau dominan mempengaruhi variabel tergantung. Hipotesis statistik yang digunakan sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. $H_0 : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujiannya adalah:

- a. Jika, t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_1, H_2, H_3 dan H_4 diterima.
Artinya terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika, t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_1, H_2, H_3 dan H_4 ditolak.
Artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Uji bersama-sama)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak/ bersama-sama. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_1 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability = 5% ($\alpha = 0,05$)

- Jika $sig > \alpha (0,05)$, maka H_0 diterima H_5 ditolak.
- Jika $sig < \alpha (0,05)$, maka H_0 ditolak H_5 diterima.